



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. YULIUS KATANGA LURA, Lahir di Hadakamali, tanggal 21 Juli 1976,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Nggoti, RT. 008 RW. 004, Desa
Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijilu, Kabupaten
Sumba Timur;
Sebagai.....Pemohon I;

2. MARIA DANGA ATA PAU, Lahir di Hadakamali, tanggal 10 Juni 1982,
Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Nggoti, RT.
008 RW. 004, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla
Waijilu, Kabupaten Sumba Timur;
Sebagai.....Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 18 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp, tertanggal 18 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Baingu menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 September 1999 sesuai Akta Nikah Nomor : 007/L.a/GKS.B/V/2015, tertanggal 14 Mei 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;
 - JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
 - JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;
3. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat (1) dan (2) serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak-anak dan keluarga para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh Akta Perkawinan para pemohon dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang dilangsungkan di Baing menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 September 1999 sesuai Akta Nikah Nomor : 007/L.a/GKS.B/V/2015, tertanggal 14 Mei 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan ini dan kepadanya diberikan salinan penetapannya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN / ATAU : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah Gereja Kristen Sumba Jemaat Baingu, Nomor : 007/I.a/GKS.B/V/2015, tertanggal 14 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5311110210080001, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 tanpa aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. DOMINGGUS YIWA NGGANJI.

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 1. NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;
 2. JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
 3. JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



2. BARA MEHA KOTA.

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 1. NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;
 2. JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
 3. JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah supaya pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Baingu pada tanggal 30 September 1999 dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Baingu pada tanggal 30 September 1999 ;
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 1. NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;
 2. JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
 3. JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan, pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku***, sehingga walaupun telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama, namun untuk dapat diakui keberadaannya oleh negara maka perkawinan haruslah sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa mengenai belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon ini, pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa ***Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*** sementara dalam ayat (1) huruf a pasal 8 Undang-undang tersebut mengatur bahwa ***menjadi kewajiban instansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting*** sehingga dengan demikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatan perkawinan, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** dan sebagaimana tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri yang menginginkan adanya tertib administrasi bagi seluruh penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;
2. JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
3. JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karena tujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I. YULIUS KATANGA LURA dengan Pemohon II. MARIA DANGA ATA PAU yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Baingu pada tanggal 30 September 1999 adalah sah menurut hukum dengan anak-anak bernama :
 1. NAOMIR NGGADJI, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 14 Oktober 1985;

Halaman 6 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUFRIADI ERNES LURA, anak laki-laki, lahir di Hadakamali, pada tanggal 05 Juli 2005;
3. JENIARTI SAPUTRI LURA, anak perempuan, lahir di Hadakamali, pada tanggal 22 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 oleh saya A.A.AYU DHARMA YANTHI,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YANSYE M. ADOE.

HAKIM,

ttd

A.A.A.DHARMA YANTHI,S.H,M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp 134.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp 25.000,- |
| 4. Biaya meterai | : Rp 6.000,- |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp 5.000,- |
| Total | : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan nomor 133/Pdt.P/2015/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juli 2015 dengan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------|
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 10.000,- |
| - Upah tulis | Rp. 2.400,- |

Jumlah Rp. 18.400,-

(delapan belas ribu empat ratus rupiah)